



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.76/M.PPN/HK/06/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL
2005-2025**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur keberhasilan dan pencapaian atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2020-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 untuk selanjutnya disebut Tim Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan, melaksanakan arahan dari Tim Pengarah, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun panduan teknis pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 meliputi evaluasi kinerja pembangunan, evaluasi efektivitas kebijakan strategis, dan evaluasi dampak/manfaat kebijakan strategis;
 - b. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait perihal hasil capaian dan evaluasi kinerja pembangunan, serta menyusun laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan;
 - c. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait perihal evaluasi efektivitas kebijakan strategis serta menyusun laporan hasil evaluasi efektivitas kebijakan strategis;
 - d. melakukan ...

- d. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait perihal evaluasi dampak/manfaat kebijakan strategis melalui pelaksanaan survei nasional, serta menyusun laporan hasil evaluasi dampak/manfaat kebijakan strategis; dan
- e. menyusun laporan Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 berdasarkan hasil sinkronisasi antara evaluasi kinerja pembangunan, evaluasi efektivitas kebijakan strategis, dan evaluasi dampak/manfaat kebijakan strategis, serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

KEENAM : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KELIMA, didukung oleh Kelompok Kerja yang terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Bidang Ekonomi;
- b. Kelompok Kerja Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;
- c. Kelompok Kerja Bidang Wilayah dan Tata Ruang;
- d. Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Prasarana;
- e. Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- f. Kelompok Kerja Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- g. Kelompok Kerja Bidang Politik;
- h. Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Aparatur; dan
- i. Kelompok Kerja Bidang Pertahanan dan Keamanan.

KETUJUH : Kelompok Kerja huruf a sampai dengan huruf i sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas:

- a. melakukan koordinasi dan konsolidasi hasil capaian kinerja pembangunan masing-masing bidang;
- b. menyusun hasil capaian kinerja pembangunan masing-masing bidang;
- c. melaporkan capaian kinerja pembangunan masing-masing bidang kepada Ketua Tim Pelaksana;
- d. memberikan masukan dan menyampaikan kebijakan strategis terpilih, indikator pembangunan terpilih, dan indikator dampak pembangunan, yang mewakili masing-masing bidang; dan
- e. memberikan masukan dan sinkronisasi hasil evaluasi kinerja pembangunan, evaluasi efektivitas kebijakan strategis, dan evaluasi dampak/manfaat kebijakan strategis, pada masing-masing bidang.

KEDELAPAN : ...

- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Evaluasi RPJPN 2005-2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.76/M.PPN/HK/06/2021
TANGGAL 30 JUNI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota :
1. Inspektur Utama, Bappenas;
 2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG ...

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

13. Kepala ...

13. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Keuangan;
14. Kepala Biro Perencanaan, Badan Pusat Statistik;
15. Dr. Ir. Budhi Santoso, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Kelompok Kerja Bidang Ekonomi

Ketua merangkap Anggota : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota :
1. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktorat Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian;
 11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan;
 12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial;

13. Kepala ...

13. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Ketenagakerjaan;
14. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
15. Tini Partini Nuryawani, S.Si, MDEC, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Anna Nur Rahmawaty, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Sigit Santoso S.Pd, M.Pd, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Siswandi, SE, QIA, Kementerian PPN/Bappenas.

2. Kelompok Kerja Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Ketua merangkap Anggota : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota :
1. Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 5. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia;
 6. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia;
 7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kesehatan;
 8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Agama;
 9. Kepala Biro Perencanaan, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional;

10. Kepala ...

10. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Perpustakaan Nasional RI;
12. Meitha Ika Pratiwi, S.P, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Chairul Rijal, SE, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Yenni Anggrayni, S.Pd, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Rahmat Hidayat S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

3. Kelompok Kerja Bidang Wilayah dan Tata Ruang

Ketua merangkap Anggota : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota :
1. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 6. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 7. Kepala Biro Perencanaan, Badan Informasi Geospasial;
 8. Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 9. Inda Monita, SE, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;

11. Sinta ...

11. Sinta Paramita, ST, Kementerian PPN/Bappenas;

12. Karsinah, Kementerian PPN/Bappenas.

4. Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Prasarana

Ketua merangkap Anggota : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri (PAKLN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Tini Partini Nuryawani, S.Si, MDEC, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Ika Widyawati, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Ratri Ismayasti, ST, MT, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Adi Haryo Yudanto, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas.

5. Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Ketua merangkap Anggota : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur ...

2. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas
4. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;
7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Andi Setyo Pambudi, ST, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Rudi Aditya Pratomo, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.

6. Kelompok Kerja Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ketua merangkap Anggota : Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Kepala ...

4. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;
5. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi;
6. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian;
7. Kepala Biro Perencanaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
10. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
11. Kepala Biro Perencanaan, Badan Tenaga Nuklir Nasional;
12. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
13. Meitha Ika Pratiwi, S.P., MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Indra Wisaksono, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Grace Second Lady Manalu, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Ari Setiawan, SE, Kementerian PPN/Bappenas.

7. Kelompok Kerja Bidang Politik

Ketua merangkap Anggota : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

3. Kepala ...

3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Luar Negeri;
4. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri;
5. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Inda Monita, SE, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Ir. Bambang Triyono, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Yulia Agnis Sutarno, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

8. Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Aparatur

Ketua merangkap Anggota : Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota :
1. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri;
 5. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Mahkamah Agung RI;
 7. Kepala Biro Perencanaan, Kejaksaan RI;
 8. Kepala Biro Monitoring dan Evaluasi, Kepolisian Negara Indonesia;
 9. Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi;
 10. Kepala Biro Keuangan, Komisi

Pemberantasan ...

Pemberantasan Korupsi;

11. Inda Monita, SE, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Novi Mulia Ayu, SE, MIDEK, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Ladislaus Ryanniro Tumanggor, S.T, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Novi Nurviani, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas.

9. Kelompok Kerja Bidang Pertahanan dan Keamanan

Ketua merangkap Anggota : Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota :
1. Direktur Pengendalian Program dan Anggaran, Kementerian Pertahanan;
 2. Kepala Biro Monitoring dan Evaluasi, Kepolisian Negara Indonesia;
 3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Intelijen Negara;
 4. Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 5. Kepala Biro Perencanaan Badan Keamanan Laut;
 6. Kepala Biro Perencanaan, Badan Narkotika Nasional;
 7. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan, Dewan Ketahanan Nasional;
 8. Inda Monita, SE, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Afwandi, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Heriyadi, S.Sos, MT, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;

11. Andreas Rudika Andriyanto S.Si,
Kementerian PPN/Bappenas;
12. Toni Priyanto J, S.Kom, ME, Kementerian
PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

